

**REPRESENTASI EMANSIPASI WANITA DALAM BUDAYA JAWA  
PADA FILM *KARTINI* (2017)**

Rakhma Ayudia Putri, Turnomo Rahardjo, Triyono Lukmantoro  
[rakhmaayudia@gmail.com](mailto:rakhmaayudia@gmail.com)

**Program Studi S1 Ilmu Komunikasi**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**

**Jl. Prof. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang Kotak Pos 1269 Telepon (024) 746407 Faksimile  
(024) 746504 Laman: <https://fisip.undip.ac.id> / Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)**

**ABSTRACT**

*The dissemination of values brought by films as mass media can influence society in constructing ideologies. In media ecology theory, media are considered more than just channels for message transmission; the inherent nature of the medium can be key to a social impact. This includes how various gender aspects regarding the portrayal of women's roles in films can affect societal perspectives and ideologies. "Kartini" (2017) is a biopic depicting the life journey of R.A. Kartini, a national female figure originating from Java who pioneered the women's emancipation movement in Indonesia. This research examines how the representation of women's emancipation is depicted through symbols in the film "Kartini" (2017) and how gender relations occur in feudal Java. This study employs qualitative descriptive research focusing on how Javanese culture can influence gender relations and power dynamics. Representation is conducted using John Fiske's semiotic analysis method, The Codes of Television, which examines the unit of analysis through three levels of social codes: reality, representation, and ideology. The research findings reveal that the representation of women's emancipation struggle in the film "Kartini" (2017) depicts women's roles as agents of resistance, challenging cultural norms and patriarchal ideologies that limit women's mobility within the entrenched patriarchy of Javanese culture. Patriarchy, through Javanese cultural traditions and values, legitimizes the subordination of women, thus necessitating emancipation movements to achieve physical, intellectual, and social liberation as a form of resistance against patriarchal hegemony. The representation of women's emancipation in the film "Kartini" (2017) illustrates how contradictions and negotiations are undertaken by women to drive social change and achieve gender equality.*

**Keywords: Culture, Emancipation, Representation, Semiotics, Women.**

**ABSTRAK**

Persebaran nilai yang dibawa oleh film sebagai media massa membawa nilai yang dapat mempengaruhi masyarakat dalam konstruksi ideologi. Dalam teori ekologi media, media dianggap lebih dari sekadar saluran transmisi pesan, di mana sifat dasar medium dapat menjadi kunci dari suatu dampak sosial. Termasuk bagaimana berbagai aspek gender mengenai peran wanita yang digambarkan dalam film dapat berdampak pada cara pandang dan ideologi masyarakat. Film *Kartini* (2017) merupakan film biopik yang menceritakan tentang perjalanan hidup R. A. Kartini, salah satu tokoh nasional wanita yang berasal dari daerah Jawa sebagai seorang pelopor gerakan emansipasi wanita di Indonesia. Penelitian ini mengkaji bagaimana representasi emansipasi wanita digambarkan melalui simbol-simbol yang ada pada Film *Kartini* (2017) serta bagaimana relasi gender terjadi di Jawa pada jaman feodal. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang berfokus bagaimana budaya Jawa dapat mempengaruhi relasi gender dan kekuasaan melalui. Representasi dilakukan

dengan metode analisis semiotika *The Codes of Television* John Fiske yang mengkaji unit analisis melalui *three level of social codes* pada tingkatan relitas, representasi, dan ideologi. Hasil dari penelitian menemukan bahwa representasi perjuangan emansipasi wanita dalam film *Kartini* (2017) menunjukkan peran-peran wanita sebagai agen perlawanan, menantang norma-norma budaya dan ideologi patriarki yang membatasi ruang gerak perempuan pada hegemoni patriarki yang tertanam dalam budaya Jawa. Patriarki, melalui tradisi dan nilai-nilai budaya Jawa, melegitimasi subordinasi perempuan sehingga pergerakan emansipasi perlu dilakukan untuk mewujudkan pembebasan fisik, pemikiran, dan hak-hak sosial sebagai bentuk perlawanan terhadap hegemoni patriarki. Representasi emansipasi wanita dalam Film *Kartini* (2017) menunjukkan bagaimana kontradiksi dan negosiasi dilakukan oleh perempuan dalam mendorong terjadinya perubahan sosial dan mewujudkan adanya kesetaraan gender.

**Kata Kunci:** Budaya, Emansipasi, Representasi, Semiotika, Wanita.

## I. PENDAHULUAN

Film merupakan media yang memiliki sifat visual atau audio visual untuk menyampaikan pesan terhadap sekelompok orang yang berkumpul pada suatu tempat (Trianton, 2013). Sebagai salah satu media komunikasi massa, film dianggap dapat membantu menghasilkan ruang publik baru di mana individu dapat membaaur untuk mendayagunakan budaya baru. Perkembangan pesat film di awal era kebangkitannya menciptakan sebuah kesan bahwa media semakin terdemokratisasi dan dapat terakses oleh massa secara lebih mudah (Kellner, 2015). Melalui hal ini, dapat dikatakan bahwa film bisa menjadi salah satu alat dalam pendistribusian budaya baru terhadap masyarakat berdasarkan pesan yang disampaikannya melalui media audio visual.

Media massa memiliki fungsi penting dalam penyampaian pesan, nilai, dan informasi. Sebagaimana terangkum dalam model komunikasi yang disampaikan oleh Laswell (dalam Hodgkinson, 2017) bahwa secara tersirat media memiliki kapasitas untuk mempengaruhi pikiran maupun cara hidup yang lebih luas terhadap audiens melalui bagaimana konten media dianggap dapat mewakili baik secara parsial maupun secara khusus. Selaras dengan

salah satu fungsi media massa sebagai media penyebaran nilai (*transmission of value*), persebaran nilai-nilai melalui film juga dapat terlaksana secara lebih efektif melalui bentuk komunikasi yang ditawarkan dengan bentuk audio dan visual. Persebaran nilai dan pesan yang diterima oleh masyarakat akan kembali dikonstruksikan melalui peran aktif audiens dalam proses komunikasi untuk memahami suatu budaya atau bahkan merekonstruksi suatu budaya.

Persebaran nilai yang dibawa melalui film sebagai media massa membawa berbagai pengaruh bagi perspektif maupun kehidupan sosial masyarakat, termasuk bagaimana ideologi yang dibawa dalam film tersebut memengaruhi masyarakat dalam pembentukan konstruksinya atas suatu hal. Disebutkan dalam teori ekologi media, menurut pendapat ahli, media dianggap lebih dari sekadar saluran transmisi pesan, di mana sifat dasar medium dapat menjadi kunci dari dampak sosial. Berdasarkan perspektif ini, media dapat memiliki kekuatan sosial yang kuat dan memengaruhi cara manusia memandang serta memahami dunia (Croteau et al., 2019). Begitu pula pada bagaimana representasi perempuan yang dapat banyak berubah dimaknai masyarakat bergantung pada perspektif yang ditawarkan oleh kekuatan media

massa. Penggambaran perempuan yang beragam pada film secara tidak langsung menciptakan berbagai cara pandang mengenai perbedaan representasi perempuan oleh khalayak.

Berbagai aspek gender mengenai peran perempuan di masyarakat banyak diangkat dalam perfilman Indonesia. Umumnya mengenai bagaimana relasi gender dan diskriminasi antara perempuan dan laki-laki melalui penggambaran tokoh, watak, dan alur cerita yang ada dalam film. Pengangkatan persoalan gender ke dalam film Indonesia telah dibahas pada berbagai penelitian, salah satunya penelitian oleh Abdul Firman Ashaf berkolaborasi bersama dengan Dinas Pendidikan yang mengidentifikasi ketimpangan gender melalui domestifikasi terhadap perempuan serta politik relasi gender, segregasi perempuan dalam realitas simbolik film, dan adanya perempuan sebagai objek seks (Hamdja et al., 2020).

Perkembangan film biopik Indonesia telah mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir ditandai dengan bergeraknya produksi film yang makin banyak menggambarkan kehidupan tokoh-tokoh sejarah yang memiliki pengaruh di Indonesia. Menurut pendapat Brown & Vidal (2014), disebutkan bahwa perkembangan yang terjadi pada genre film biopik mencakup berbagai representasi dalam kehidupan nyata tokoh yang berkaitan, penggambaran kompleks, narasi yang cenderung mengaburkan genre, elemen refleksif, perspektif secara global, dan hingga mencakup ketelibat penonton di dalamnya.

Genre biopik secara umum menceritakan sebuah kisah nyata atau kisah hidup tokoh-tokoh berpengaruh di masa lampau maupun masa kini, seperti politikus, ilmuwan, industrialis, dan pengusaha (Brown & Vidal, 2014). Di

Indonesia, salah satu film dengan genre biopik yang cukup terkenal secara produksi film dan cerita perjuangan hidup tokohnya masih dikenang dari generasi ke generasi adalah figur R.A. Kartini yang dikisahkan melalui film *Kartini* (2017). Film *Kartini* (2017) hadir bukan hanya sebagai bagian dari media massa yang menyalurkan fungsi persebaran nilai, namun juga sebagai film biopik yang merepresentasikan biografi dari tokoh pelopor emansipasi wanita di Indonesia yang berasal dari daerah Jawa.

Film *Kartini* (2017) banyak melibatkan penokohan yang kental dengan kultur Jawa dalam menjalani kehidupannya. Karakter perempuan Jawa digambarkan sangat dekat dengan budaya, melalui tutur yang halus, tenang, diam tidak menyenangi berkonflik, memprioritaskan perdamaian, menjunjung nilai dalam keluarga, dapat mengerti orang lain, sopan, terkontrol, memiliki daya tahan tinggi atas penderitaan, memegang peran secara ekonomi, dan setia (Handayani & Novianto, 2004).

Pada latar waktu yang dikisahkan sekitar tahun 1982, R.A. Kartini diperlihatkan sebagai tokoh yang memperjuangkan kesetaraan gender pada zamannya dengan berani mendobrak tradisi yang dianggap dirinya membatasi perempuan. Keberanian dan kegigihan R. A. Kartini dalam memperjuangkan kebebasan melalui dan pendidikan bagi perempuan kemudian banyak mempengaruhi kedua adik perempuannya dalam melihat realitas mengenai ketidaksetaraan gender yang pada akhirnya melahirkan sudut pandang feminitas. Namun, meskipun terlihat bersimpangan dengan karakter umum yang dimiliki wanita Jawa, R.A. Kartini tetap menggunakan pendekatan yang luwes untuk sedikit demi sedikit melakukan pergerakannya. Selaras dengan pernyataan terkait peran penting dalam masyarakat yang

berhasil dipegang oleh wanita cenderung dikuasai melalui pendekatan netral yang luwes (Handayani & Novianto, 2004).

Polemik dalam relasi gender menjadi gugatan dari hadirnya ideologi feminis dalam melihat realitas pada mengenai ketimpangan hak yang mampu didapatkan oleh perempuan dan laki-laki. Tantangan akan konstruksi gender dalam peran yang dimiliki wanita bukan hanya terjadi pada realitas semata. Pada media, sekitar abad ke-19 perempuan dalam film digambarkan secara sangat terbatas sebagai objek pasif dan lemah dengan peran sebagai pelengkap cerita serta pemanis visual (Thornham, 2009). Peran yang digambarkan terbatas pada lingkungan domestik sebagai pendukung atas aktivitas utama laki-laki di masyarakat dalam lingkup sosial dan politik.

Film *Kartini* (2017) memperlihatkan pergerakan R. A. Kartini dan kedua adiknya dalam memperjuangkan kesetaraan yang muncul dari kesadaran mengenai nilai dan hak yang seharusnya didapatkan oleh perempuan. Pergerakan tersebut direpresentasikan dalam film melalui perilaku-perilaku yang banyak berseberangan dengan bagaimana perempuan Jawa digambarkan dalam budaya Jawa sebagai tokoh yang lemah lembut dan penurut.

Tokoh-tokoh pergerakan emansipasi dalam Film *Kartini* (2017) digambarkan sebagai tokoh yang menolak kepasrahan atas terjadinya subordinasi melalui sikap berani melawan dan mengutarakan pendapatnya, cerdas, dan gigih untuk memperjuangkan pendidikan, serta berani untuk menyuarkan kebebasan melalui karya-karya secara diplomatis. Selaras dengan bagaimana kekuasaan wanita Jawa identik dengan cara-cara pengambilan keputusan melalui sebuah proses panjang yang terdiri dari adaptasi, pemaknaan kembali, hingga strategi diplomasi yang dipilih (Handayani & Novianto,

2004). Rangkaian proses pengambilan keputusan dalam konteks keyakinan R.A. Kartini memperjuangkan kesetaraan hak bagi wanita Jawa diurai melalui perjalanan panjang yang dilakukan sedari kecil hingga di usia dewasa.

Adanya gugatan mengenai relasi gender yang ada di Indonesia pada zaman kolonialisme menunjukkan bahwa perkembangan budaya mengalami pergeseran dari waktu ke waktu. Hal ini mengakibatkan adanya anomali pada bagaimana perempuan ditempatkan di masyarakat sesuai dengan budaya dominan yang dipercaya oleh publik. Melalui penggambaran kehidupan R.A. Kartini sebagai wanita Jawa pada masa kolonialisme Indonesia, Film *Kartini* (2017) berusaha untuk memperlihatkan potret dari kehidupan masyarakat Jawa pada abad ke-19 secara keseluruhan dan bagaimana pergerakan R.A. Kartini dalam memperjuangkan kesetaraan bagi wanita pada masa tersebut.

Penelitian ini dilandaskan pada pemosisian media massa yang memiliki fungsi *transmission of value* dalam memberikan pengaruh bagi audiensnya. Secara lebih lanjut, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *study of culture*. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana budaya yang ada pada masyarakat mempengaruhi adanya hubungan dan kekuasaan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui representasi emansipasi wanita dalam budaya Jawa dan menjelaskan relasi gender yang berkaitan dengan emansipasi wanita melalui simbol-simbol yang ada dalam film *Kartini* (2017).

## II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif interpretif dengan paradigma kritis. Pendekatan *study of culture* diterapkan dalam penelitian ini untuk menggambarkan bagaimana kultur yang ada pada masyarakat mempengaruhi adanya hubungan antara budaya dan kekuasaan, bagaimana budaya dapat digunakan untuk mendominasi ataupun memberdayakan kelompok-kelompok tertentu (Hall, 1997).

Pengumpulan korpus dilakukan menggunakan cara pengamatan dan analisis terhadap teks yang terdapat dalam Film *Kartini* (2017) melalui teknik dokumentasi. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 25 adegan terpilih yang mengandung pemosisian wanita Jawa, cara pandang terhadap wanita Jawa, serta unsur budaya Jawa yang memunculkan representasi emansipasi wanita dalam budaya Jawa yang terkandung di dalam film.

Proses pengkajian dalam penelitian ini dilakukan melalui metode analisis semiotika *the codes of television* dari John Fiske melalui analisis *three level of social codes*. Analisis semiotika berfokus pada cara-cara memproduksi makna melalui kode dan simbol pada media. Kode merupakan penghubung antara produser, teks, dan khalayak, dan merupakan agen intertekstualitas di mana teks yang ada saling memiliki hubungan antara satu sama lain dalam jaringan makna yang membentuk suatu budaya. (Fiske, 2001).

Analisis semiotika digunakan untuk mengungkap lapisan-lapisan makna tersurat maupun tersirat yang telah terstruktur di dalam sebuah penyiaran. Secara lebih lanjut, Fiske menampilkan representasi semiotika dalam suatu objek media melalui tahapan berikut:

a. Level pertama (level realitas) adalah proses bagaimana peristiwa ditandai dalam bahasa

yang ada dalam gambar, sering kali memiliki keterhubungan dengan lingkungan, pakaian, ekspresi, dan ucapan.

- b. Level kedua (level representasi) merupakan proses realitas digambarkan melalui kamera, pencahayaan, *editing*, dan musik yang mengiringi.
- c. Level ketiga (level ideologi) melingkupi proses bagaimana peristiwa diorganisir dalam kesepakatan yang dapat diterima di dalam masyarakat. Kode-kode yang ada diproses untuk melihat keterhubungan dan keterkaitannya secara sosial. (Fiske, 2001)

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian dilakukan, berikut hasil yang ditemukan dalam penelitian terkait.

#### 3.1 Emansipasi dan Hegemoni Budaya Patriarki Pada Zaman Kolonial

Pada era kolonial, zaman di mana Kartini lahir dari kecil hingga dewasa, sebagaimana digambarkan dalam film wanita masih mengalami berbagai bentuk penindasan yang umumnya datang dari budaya patriarki. Pada *setting* tempat yang menceritakan kisah hidup Kartini di daerah Jawa, tradisi patriarki yang ada cenderung berkaitan dengan pembatasan peran-peran perempuan dalam ruang domestik. Hal ini banyak ditunjukkan di dalam film melalui penggambaran nasib wanita untuk hidup mempersiapkan diri bagi pernikahan dan perjodohan, baik bagi wanita dengan status sosial tinggi yang berdarah ningrat keturunan pimpinan pemerintahan seperti Kartini, maupun bagi wanita dengan status sosial menengah ke bawah yang kehidupannya terjerat ketidakcukupan dan pernikahan dianggap sebagai sesuatu yang dapat memperbaiki kehidupan.

Tradisi turun-menurun di Jawa baik melalui

serat-serat *lawas* budaya maupun nasihat para orang tua, memberikan identifikasi pada wanita yang lekat dengan pemosisiannya sebagai individu yang harus memiliki keterampilan dalam mengurus rumah tangga. Pada beberapa kasus, bahkan hal ini menyebabkan adanya bias atas kesadaran para wanita akan hak-hak yang sesungguhnya juga boleh dipilih olehnya sebagai seorang manusia. Di dalam film, diceritakan bahwa mayoritas masyarakat wanita di Jepara masih menganggap bahwa menjadi seorang istri dan ibu adalah tujuan hidupnya kelak di kemudian hari, sehingga banyak pula wanita yang terjebak pada pernikahan dini karena narasi pengabdian terhadap keluarga sebagai tujuan hidup dari seorang wanita masih menjadi kepercayaan secara turun menurun.

Bias yang terjadi pada kesadaran wanita di Jawa, menjadikan mereka juga tidak sadar atas kebebasan yang sejatinya dibatasi oleh dominasi budaya patriarki. Kesadaran Kartini akan hal ini, menjadikan dirinya memulai pergerakan untuk menantang tradisi yang membatasi kebebasan perempuan untuk menentukan pilihannya. Kartini mengkritik adanya penindasan bagi perempuan dalam tradisi patriarki Jawa dan kolonialisme Belanda, serta memperjuangkan perubahan struktur sosial yang lebih setara (Stoler, 2019).

Berdasarkan sudut pandang Neo-Marxisme, emansipasi wanita yang digambarkan dalam Film *Kartini* (2017) merupakan bentuk perjuangan dalam melawan reproduksi ideologi yang tertanam pada struktur sosial dan budaya pada masyarakat Jawa. Dalam reproduksi ideologi, patriarki sebagai budaya dominan dipertahankan melalui berbagai institusi (Althusser, 1971). Cara-cara institusi dalam mempertahankan patriarki sebagai budaya dominan yang menciptakan subordinasi terhadap wanita dilakukan melalui: (1) institusi keluarga dengan menanamkan ajaran kepada

anak perempuan untuk mengurus rumah tangga dan keluarga, (2) institusi pendidikan dengan sistem pendidikan yang tidak memberikan kesempatan sama bagi perempuan dan laki-laki, (3) institusi agama mayoritas di Jawa yang ajarannya diinterpretasikan mendukung domestifikasi dan peran perempuan di rumah tangga melalui lazimnya praktik poligami.

Gerakan emansipasi wanita yang ditunjukkan tokoh Kartini di dalam film berfokus pada dua hal utama yaitu pendidikan dan pemberdayaan perempuan. Hal ini selaras dengan ungkapan dari McVey (2021) yang membahas mengenai gender dan kekuasaan yang ada di Indonesia, bahwa Kartini tidak hanya memperjuangkan pendidikan perempuan, namun juga mendorong perempuan untuk aktif dalam kegiatan sosial politik, serta memperjuangkan hak-hak dasar perempuan. Dorongan yang diberikannya kepada para perempuan untuk turut terlibat pada masyarakat merupakan bentuk pengusahaan atas terciptanya pemberdayaan perempuan pada jaman tersebut.

Pergerakan Kartini dalam memperjuangkan emansipasi wanita diwujudkan dalam bentuk pendirian sekolah bagi perempuan di Jepara dan dorongan yang terus diberikannya kepada perempuan untuk bisa mendapatkan pendidikan serta hak-haknya. Kartini percaya bahwa perempuan berhak untuk menyuarakan pilihannya dalam menentukan masa depan dan kemauan hidupnya.

### **3.2 Batasan dan Ruang Gerak Wanita Jawa**

Perjalanan hidup Kartini yang diadaptasi dalam Film *Kartini* (2017) banyak menggambarkan bagaimana batasan serta ruang gerak yang dimiliki oleh wanita Jawa pada jaman kolonial. Batasan paling jelas yang digambarkan dalam film adalah bagaimana kehidupan wanita Jawa dianggap wajar dan sesuai dengan tatanan

budaya apabila ruang gerak nya ada di sektor domestik. Hal ini juga berkaitan dengan bagaimana adat pingitan yang dijalankan oleh para puteri-puteri berdarah ningrat hanya mempersiapkan wanita untuk kehidupan pernikahan dengan mengajarkan cara merawat diri, bersolek, memasak, dan bersikap patuh kepada suami. Pada kenyataannya, pingitan merupakan bentuk subordinasi wanita Jawa dengan aturan yang melarang mereka keluar rumah tanpa pendampingan laki-laki. Tradisi pingitan ini mengekang perempuan Jawa dalam menentukan pilihan hidup dan mengeksplorasi potensi diri (Arivia, 2015).

Peran yang turun-temurun diwariskan oleh budaya Jawa untuk menjadikan wanita sebagai sosok sentral dalam keluarga dan rumah tangga, memunculkan anggapan bahwa sejatinya peran ini merupakan kodrat yang harus dijalani oleh wanita. Sejatinya kodrat yang dimiliki oleh wanita adalah kemampuan untuk memberikan kehidupan dengan cara mengandung dan menyusui (Handayani & Novianto, 2004). Namun, konsep dari kodrat ini pada akhirnya meluas dan menjadikan kewajiban wanita untuk mengabdikan diri bagi keluarga menjadi peran yang wajar menurut tradisi. Pandangan mengenai konsep kodrat wanita sering dilegitimasi dengan anggapan bahwa secara biologis dan psikologis wanita lebih cocok untuk peran mengasuh dan mengatur rumah tangga (Connel, 2019).

Keterbatasan ruang gerak wanita pada jaman feodal juga menunjukkan bagaimana hegemoni patriarki tertanam dalam budaya Jawa. Batasam yang digambarkan secara konkrit adalah bagaimana tradisi pingitan dan penekanan terhadap keterampilan domestik seperti memasak dan perawatan diri, membatasi perempuan dalam ruang privat dan menghambat partisipasinya dalam ruang publik (Koentjaraningrat, 1985). Selain itu,

penggambaran wanita ideal seperti pepatah Jawa terkait “kodrat wanita di dapur” dan “wanita yang baik ialah wanita yang patuh pada suami” melegitimasi subordinasi perempuan dan membatasi ruang gerak perempuan (Mulyani, 2007).

Selama berabad-abad hegemoni patriarki dalam budaya Jawa telah membatasi ruang gerak perempuan (Suryakusuma, 2005). Pembatasan ruang gerak perempuan diakibatkan struktur patriarki sebagai budaya dominan yang tidak mewakili kepentingan bersama, sehingga seiring waktu tercipta adanya negosiasi dari kelompok subordinat untuk dapat mencapai konsensus yang bisa diterima dan mewakili seluruh kepentingan kelompok, bukan hanya kelompok dominan. Kesadaran atas keterbatasan inilah yang menjadikan Kartini bergerak dalam memperjuangkan hak wanita untuk meaksimalkan potensi mereka diluar sektor domestik, khususnya di bidang pendidikan. Gramsci (dalam Hardjito, 2014) juga menyatakan bahwa pada dasarnya kunci dari teori hegemoni Gramsci adalah negosiasi, karena kelompok dominan harus bisa berkoordinasi, memperluas, dan mengembangkan interensya dengan kepentingan kelompok subordinat.

### **3.3 Emansipasi Wanita dalam Film Kartini (2017)**

Konsep emansipasi wanita, sebagai perwujudan perjuangan menghadapi norma patriarki dan keterbatasan tradisional, menjadi tema utama dalam narasi film Kartini. Dalam konteks ini, Kartini, sebagai tokoh utama, dihadapkan pada tantangan serius akibat praktik pingitan yang ada dalam budaya masyarakat Jawa pada periode tersebut.

Berdasarkan alur cerita yang ada pada Film *Kartini* (2017), munculnya perasaan dari dalam

Kartini untuk dapat memperjuangkan emansipasi yang pada akhirnya menciptakan dinamika pada pergerakannya yang diawali dari dalam kamar pingitan berasal dari Sosrokartono, kakak tertuanya. Sosrokartono banyak mengubah pandangannya tentang pingitan dengan memberikan kesempatan pada Kartini untuk membebaskan wawasannya melalui literasi dan penulisan. Meskipun terbatas fisik dalam pingitan, Kartini mampu membaca literatur Belanda, menulis artikel, dan mengirim surat korespondensi untuk memperluas relasi. Hal ini menyoroti gagasan bahwa emansipasi wanita tidak hanya melibatkan pembebasan fisik, tetapi juga melibatkan pembebasan pikiran dan keinginan untuk memberikan kesetaraan bagi perempuan dan masyarakat pada umumnya. Selaras dengan pendapat dari Hooks (2015) yang menyatakan bahwa emansipasi wanita bukan hanya tentang mengenai pembebasan fisik dari belenggu patriarki, namun juga tentang pembebasan pikiran serta keinginan di mana perempuan harus didorong untuk turut berpikir kritis mengenai peran dalam masyarakat, juga untuk memperjuangkan kesetaraan atas seluruh aspek kehidupan.

Emansipasi wanita yang difokuskan oleh Kartini dalam film adalah kesempatan atas akses pendidikan. Pentingnya pendidikan dalam perjalanan emansipasi Kartini tercermin dalam kemampuan berbahasa Belanda dan literasi yang diperolehnya yang menjadi titik awal dari pergerakan emansipasi yang dimulai dari dirinya bagi orang-orang terdekat serta lingkungan sekitar. Dirinya bergerak mengusahakan diri untuk menjadi pelopor perubahan sosial dengan merumuskan gagasan-gagasan tentang pendidikan, sosial, dan ekonomi melalui literasi dan artikel-artikel yang ditulisnya. Tulisan-tulisan Kartini memberikan kritik berharga bagi struktur patriarki dan kolonial yang menindas perempuan pada masanya, dimana dirinya dengan berani

menentang norma sosial yang membatasi perempuan pada peran domestik, mengecualikan wanita dari pendidikan, serta partisipasi publik (Mandal, 2013).

Fokus pergerakan Kartini dalam pendidikan yang banyak disoroti pada film juga berkaitan dengan latar belakangnya sebagai seorang wanita berketurunan *ningrat* atau bangsawan. Emansipasi yang dibawa oleh Kartini yang tergolong sebagai perempuan kelas atas dalam strata Jawa cenderung memiliki perspektif bahwa keterbelakangan perempuan didasarkan pada tidak terdapatnya kesempatan untuk bersekolah, sehingga gerakan kesetaraan yang diusahakan lebih ke arah pendidikan perempuan, selaras dengan pergerakan feminis liberal yang muncul dan berkembang pada abad delapan belas (Murniati, 2004). Melalui hal ini, dapat dikatakan bahwa pergerakan yang dilakukan oleh Kartini mencerminkan bentuk emansipasi wanita yang melibatkan pengembangan intelektual dan pemikiran kritis. Latar belakang Kartini membentuk cara-caranya untuk bersuara memperjuangkan kebebasan bagi wanita dan kelompok minoritas sepanjang perjalanan hidupnya. Kritik yang diberikan Kartini terhadap patriarki dan kolonialisme juga didasarkan pada pengalamannya sendiri sebagai wanita terpelajar. Dirinya melihat bagaimana wanita yang ada di sekitarnya dibatasi oleh norma-norma sosial dan sistem patriarki (Mandal, 2013).

Emansipasi wanita yang dapat dilihat dalam Film *Kartini* (2017) ini tidak hanya terbatas pada gerakan yang diusahakan Kartini bagi wanita dan lingkungan sekitarnya saja. Lebih dari itu, film ini menunjukkan bagaimana beberapa tokoh pria yang turut mengambil bagian dari emansipasi. Dukungan yang diberikan oleh kakak laki-laki Kartini, Sosrokartono, dengan cara memberikan kesempatan Kartini memperluas wawasan

melalui literasi serta dukungan dari ayah Kartini, R.M. Ario Sosroningrat, yang memberikan izin baginya untuk bersekolah tinggi di Belanda menunjukkan bahwa emansipasi wanita bukan hanya tanggung jawab wanita itu sendiri, tetapi tanggung jawab bersama. Selaras dengan pendapat yang menyatakan bahwa pada dasarnya emansipasi wanita bukanlah hanya mengenai perempuan, namun tentang seluruh masyarakat. Kita harus bekerja sama untuk menantang struktur dan institusi patriarki yang melanggengkan ketidaksetaraan gender (Connell, 2019). Kesadaran akan pentingnya peran semua individu, tanpa memandang jenis kelamin dapat menciptakan kesetaraan serta membuka jalan bagi transformasi sosial yang lebih luas.

Pergerakan yang ditampilkan dalam film ini menunjukkan bagaimana Kartini sebagai seorang wanita dapat mengatasi norma-norma yang menghambatnya, di mana dirinya tidak hanya menciptakan kesetaraan melalui langkah-langkah konkret seperti pendidikan dan literasi, tetapi juga melalui semangat dan aksi-aksi nyatanya yang menginspirasi perubahan di masyarakat.

Peran Kartini sebagai tokoh yang menciptakan transformasi tidak hanya terbatas pada ruang budaya Jawa, tetapi juga mencakup dimensi global, khususnya dalam membentuk hubungan dengan rekan-rekan di Belanda. Partisipasi aktif yang dilakukannya dalam komunitas global menunjukkan bahwa emansipasi wanita tidak hanya bersifat lokal, namun juga dapat juga melibatkan jaringan yang lebih luas. Perempuan di seluruh dunia terhubung oleh pengalaman dan perjuangan yang sama, di mana perempuan harus membangun jaringan global untuk memperjuangkan kesetaraan dan keadilan bagi semua perempuan (Hooks, 2015). Keterlibatan Kartini dengan rekan-rekan wanita di Belanda mencerminkan pemahaman mendalam tentang

bagaimana emansipasi wanita dapat menjadi gerakan yang melintasi batas-batas budaya dan nasional.

Dalam konteks emansipasi wanita, dapat dikatakan bahwa tokoh Kartini dalam film ini tidak hanya berkisah mengenai seorang wanita yang bangkit melawan norma-norma patriarki dalam budaya, namun juga menjadi simbol perubahan sosial yang lebih luas dengan mengangkat isu mengenai emansipasi wanita.

### **3.4 Negosiasi Identitas Tokoh dalam Film Kartini (2017)**

Menurut Ting-Toomey (2015), negosiasi identitas merujuk pada suatu proses komunikasi dan interaksi antar individu dalam masyarakat yang heterogen di mana individu secara aktif menciptakan, mengklarifikasi, dan bahkan memodifikasi identitas mereka sendiri, sekaligus merespons identifikasi orang lain. Negosiasi identitas tidak hanya terbatas pada pembentukan identitas pribadi, tetapi juga merupakan respons terhadap interaksi dengan individu yang memiliki latar belakang etnis dan budaya yang beragam. Proses ini menunjukkan bagaimana keberagaman sosial yang ada dapat menciptakan adanya negosiasi identitas antara satu sama lain. Sebagaimana disampaikan oleh Hall (2013) bahwa identitas bukanlah merupakan sesuatu yang statis, namun merupakan sesuatu yang terus menerus dinegosiasikan serta diubah dalam konteks sosial dan budaya yang berbeda. Dalam konteks Film *Kartini* (2017), keberagaman budaya yang saling dipertukarkan hingga mempengaruhi identitas pada tokoh-tokohnya adalah budaya Jawa dan Belanda yang memberikan dua nilai berlawanan yaitu kebaktian dan kebebasan.

Tokoh laki-laki yang mendukung emansipasi, seperti Sosrokartono, menunjukkan sebuah paradigma baru di tengah masyarakat yang pada

umumnya menganggap identitas laki-laki sebagai sosok dominan. Maskulinitas tradisional Jawa sering kali dikaitkan dengan dominasi dan kontrol terhadap perempuan, sehingga laki-laki Jawa yang ingin terlibat dalam emansipasi perlu menegosiasikan identitas mereka dan menentang norma-norma maskulinitas tradisional (Connel, 2019). Dukungan yang secara konkret diberikan Sosrokartono pada Kartini dengan memberikan kunci lemari buku kepada Kartini menunjukkan bahwa dirinya memberi dorongan bagi adiknya untuk berkembang dengan membuka akses pada literasi dan pengetahuan bagi Kartini, sebagai bagian dari upaya negosiasi identitasnya untuk mendukung emansipasi.

Di sisi lain, pertentangan sikap R.M. Ario Sosroningrat di masa mudanya yang menetapkan batasan tegas atas aturan budaya lalu beranjak memberikan kelonggaran atas hal tersebut untuk mendukung anak-anaknya, menampilkan bentuk negosiasi identitas yang kompleks. Konflik batin dapat terjadi sewaktu-waktu di dalam diri seseorang yang berusaha untuk menegosiasikan identitasnya, sebagaimana di dalam film R.M. Ario Sosroningrat diceritakan sampai terjatuh sakit saat berusaha untuk menegosiasikan identitasnya sebagai seorang pemimpin pemerintahan yang secara adat memiliki dominasi dan pengaruh besar, namun dirinya tetap teguh pada pilihannya untuk memberikan izin beasiswa bagi Kartini yang dianggap tidak wajar oleh para priyayi Jawa. Uraian terkait negosiasi identitas yang terjadi pada Film *Kartini* (2017) menunjukkan bagaimana negosiasi identitas yang melibatkan konflik antara tradisi dan aspirasi modern. Sejalan dengan pendapat Bhabha (2017) bahwa negosiasi identitas merupakan proses yang penuh dengan kontestasi dan konflik di mana individu harus menavigasi antara tradisi dan aspirasi modern dalam membangun

identitasnya.

Teori negosiasi identitas menekankan pada bagaimana individu berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya untuk membentuk identitas mereka. Dalam kata lain, dapat dikatakan bahwa lingkungan yang ada di sekitar individu atau kelompok terkait dapat memberikan pengaruh terhadap identitas seseorang. Dalam Film *Kartini* (2017), negosiasi identitas pada toko Kartini terjadi melalui interaksi yang berkelanjutan dengan orang-orang di sekitarnya serta berbagai pengalaman hidupnya. Kartini harus menghadapi ekspektasi sosial yang membatasi peran dan hak-haknya sebagai wanita pada zaman kolonial. Kesadaran Kartini atas ketimpangan sosial yang terjadi di sekitarnya secara tidak langsung juga membentuk identitas di dalam dirinya untuk menjadi penggerak perubahan melalui proses negosiasi identitas yang terjadi secara alami dari waktu ke waktu. Hal ini selaras dengan pendapat yang menyatakan bahwa ketidakpuasan terhadap politik dan budaya kontemporer dapat mendorong individu untuk menegosiasikan identitas mereka, dimana negosiasi identitas dapat menjadi sumber perubahan sosial dan politik (Weeks, 2019)

Negosiasi identitas dalam kisah Kartini juga mencerminkan pertentangan antara tradisi dan modernitas. Hal ini tercermin pada adegan dimana Ngasirah dan Kartini terlibat dalam perbincangan serius sebelum Kartini memutuskan untuk menerima lamaran pernikahannya. Perbincangan yang terjadi diantara keduanya membahas mengenai bagaimana negeri Belanda dapat memberikan kebebasan bagi Kartini, namun rasa tenteram hanya bisa didapatkan apabila seorang manusia “dipangku hatinya” karena keseimbangannya terjaga. Simbolisasi “pangku” dalam percakapan keduanya menggambarkan

keberserahan diri terhadap batasan takdir yang ada melalui keikhlasan hati untuk menjalankan bakti. Ngasirah secara tersirat mengingatkan sembari menasihati Kartini tentang ekspektasi sosial sebagai Raden Ayu, berkaitan dengan bagaimana kesempatan atas kehidupan yang lebih baik bisa didapatkan oleh keturunan Kartini dengan menjalani pernikahan.

Melalui percakapan ini Kartini memilih jalan untuk memperjuangkan cita-citanya dengan cara yang diplomatik, melalui pendirian sekolah untuk memberikan pendidikan bagi wanita dan orang-orang tidak mampu sembari tetap melakukan baktinya terhadap keluarga dengan menjalani pernikahan dan melanjutkan kehidupan sebagai seorang Raden Ayu. Proses negosiasi identitas yang ditunjukkan melalui adegan ini menunjukkan bahwa seseorang juga dihadapkan pada penyesuaian ketika berusaha untuk menetapkan identitasnya. Sebagaimana pendapat dari Mead (1962) yang menyatakan bahwa identitas diri terbentuk melalui interaksi sosial dan melalui cara pandang orang lain terhadap diri kita. Negosiasi identitas terjadi karena individu berusaha untuk menyesuaikan diri dengan ekspektasi dan norma sosial.

Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa Film *Kartini* (2017) menunjukkan gambaran nyata dari bagaimana teori negosiasi identitas dapat terjadi dan tidak hanya terbatas pada interaksi sosial. Negosiasi identitas yang terjadi pada suatu kelompok maupun individu juga dapat terjadi melalui konflik serta perjuangan dalam melawan ekspektasi yang diciptakan oleh aturan tertentu, termasuk budaya. Melalui representasi atas film ini, teori negosiasi identitas memberikan pemahaman yang dalam terkait bagaimana individu, seperti Kartini, dapat membentuk dan mengubah identitas mereka melalui dinamika interaksi dan pengalaman hidupnya.

### **3.5 Kelompok Co-Culture dalam Film Kartini (2017)**

Teori Co-Cultural merupakan suatu konsep yang muncul dari kajian mengenai interaksi antara anggota kelompok minoritas dengan kelompok mayoritas atau dominan. Teori ini menjelaskan bagaimana kelompok minoritas mendefinisikan identitas mereka dalam konteks budaya dominan, dimana individu bukan hanya merupakan produk dari budaya dominan, namun juga secara aktif menegosiasikan identitas mereka pada ruang antarbudaya (Hall, 2013)

Secara lebih lanjut, teori ini lahir dari pemahaman bahwa terdapat hierarki dalam masyarakat yang menguntungkan kelompok tertentu secara dominan. Dalam hierarki ini, sistem komunikasi terbentuk oleh kelompok dominan untuk menjaga kelompok subordinat tetap terpinggirkan dari budaya dominan. Hal inilah yang menyebabkan kelompok yang terpinggirkan harus bergerak secara strategis berkomunikasi untuk mengatasi sistem yang mereka hadapi.

Tokoh Kartini yang di dalam film diceritakan sebagai seorang wanita Jawa dengan status sosial tinggi berketurunan bangsawan yang hidup di bawah budaya Jawa yang menekankan peran tradisional perempuan. Pada masa ini, wanita hanya ditempatkan pada sektor domestik dan hidup hanya untuk mempersiapkan diri bagi pernikahan. Kartini yang menyadari bahwa sesungguhnya wanita memiliki hak untuk menentukan pilihan hidupnya yang lebih luas sebagaimana laki-laki yang hidup pada jaman tersebut, mencoba untuk menegosiasikan hal tersebut meskipun sering kali terbatas oleh norma-norma patriarki, Kartini menciptakan strategi komunikasi untuk menentang norma tersebut dan memilih untuk mengontrol nasibnya sendiri sebagai bentuk emansipasi. Dalam konteks Teori Co-Cultural, cara Kartini

bertindak dapat dilihat sebagai langkah negosiasinya untuk menciptakan suatu perubahan, meski dirinya berada dalam posisi subordinat. Hal ini selaras dengan pendapat Hall (2013) yang menyatakan bahwa agensi individu memungkinkan seseorang untuk memodifikasi norma budaya yang mengikatnya.

Dinamika gender yang tergambar dalam Film *Kartini* (2017) juga mencerminkan peran kuasa dan adanya ketidaksetaraan. Hal ini beberapa kali ditunjukkan melalui bagaimana pergerakan Kartini untuk menciptakan perubahan bagi wanita, tidak semata mata berjalan mulus. Dalam prosesnya, sering kali dirinya dibungkam dan tetap dibatasi ruang geraknya, Misalnya, bagaimana kedua kakak laki-lakinya yaitu Slamet dan Busono yang menutup akses baginya untuk keluar dari pendopo sehingga Kartini tidak bisa mengantarkan tulisan-tulisan artikelnya untuk diterbitkan di surat kabar. Namun di sisi lain, Kartini tidak dapat berbuat apapun karena *abdi ndalem* di pendopo lebih mendengar suara dari kakak laki-lakinya yang dianggap lebih dominan posisinya dibandingkan dengan dirinya.

Adegan di mana Kartini ditekan pada pilihan untuk menikah dan menerima lamaran Bupati, sementara di saat yang sama dirinya sedang menunggu persetujuan beasiswa sekolah tinggi dari Belanda juga menunjukkan bagaimana wanita masih belum bisa sepenuhnya lepas dari norma dan budaya yang mengikatnya. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok co-cultural dapat memiliki keterbatasan dalam melawan kelompok dominan yang memiliki kekuasaan dan sumber daya lebih besar (Hall, 2013)

Dalam konteks Film *Kartini* (2017), cara-cara yang harus dilakukan wanita oleh kelompok co-culture dalam menyampaikan suaranya tidak dapat dilakukan secara langsung. Hal ini dikarenakan budaya yang ada dalam masyarakat

cenderung dikarakterisasikan dalam hal maskulin. Bahkan, menurut Shirley Ardener (dalam Littlejohn, 2017) dikatakan bahwa bahasa yang digunakan dalam budaya masyarakat sebenarnya memiliki bias laki-laki yang melekat didalamnya, sehingga secara tidak langsung bahasa maskulin yang diciptakan oleh laki-laki sebagai kelompok dominan tersebut memenangkan atau bahkan membisukan suara feminim. Atas terjadinya hal ini, Kartini mencoba menghadapi norma budaya yang menekan, dengan menggunakan strategi komunikasi untuk menyampaikan suaranya. Pilihan-pilihan alternatif yang dilakukannya dengan cara meminta pertolongan secara diam-diam melalui surat yang tersembunyi dalam makanan, mencerminkan upaya yang dilakukannya untuk menegosiasi dinamika kekuasaan yang ada.

Cara ini menunjukkan bahwa Kartini melakukan cara komunikasi alternatif untuk tetap dapat bersuara di tengah tekanan kelompok dominan. Sebagaimana disampaikan oleh Bhabha (2017) bahwa perlawanan terhadap kelompok dominan membutuhkan strategi dan taktik yang kreatif dan inovatif, di mana kelompok co-cultural mungkin membutuhkan berbagai cara untuk melawan.

Disamping itu, kelompok co-culture dalam Film *Kartini* (2017) juga digambarkan melalui masyarakat Jawa yang memiliki status sosial lebih rendah dibandingkan dengan keturunan bangsawan asli, misalnya Ngasirah. Ngasirah sebagai ibu kandung Kartini yang harus rela hidup terpisah dari anak-anaknya serta diperlakukan seperti pembantu di lingkungan keluarganya sendiri dikarenakan dirinya berstatus sosial rendah. Tokoh Ngasirah mewakili kelompok co-cultural yang ditunjukkan memiliki keterbatasan dalam mempengaruhi perubahan norma dan mendefinisikan nasib mereka. Dirinya tidak

memiliki pilihan untuk memiliki nasib hidupnya, hanya dengan cara merelakan dirinya dimadu dan suaminya menikah kembali dengan wanita keturunan bangsawan langsung, Ngasirah dapat memberikan kesempatan hidup yang lebih baik bagi anak-anaknya meski dirinya harus berkorban. Kisah hidup tokoh Ngasirah ini menunjukkan salah satu bentuk ketidakberdayaan kelompok co-cultural yang termarginalisasi. Kelompok yang termarginalisasi terkadang memiliki akses yang terbatas pada sumber data dan platform untuk menyuarakan suara mereka dan mendorong perubahan norma (Spivak, 2018).

Teori Co-Cultural membawa kontribusi penting dalam menganalisis bagaimana ketidaksetaraan status sosial tercermin dalam dinamika komunikasi dan identitas yang tersaji dalam Film *Kartini* (2017). Terutama, adegan-adegan tertentu dalam film tersebut memberikan gambaran tentang bagaimana tekanan budaya mengenai gender dan status sosial dapat mempengaruhi cara individu dari kelompok co-cultural berinteraksi dalam masyarakat yang didominasi oleh budaya mayoritas. Dalam kerangka teori ini, adegan-adegan yang menciptakan ketidaksetaraan gender, seperti adegan di mana Kartini dihadapkan pada tekanan untuk menerima lamaran Bupati, dapat dianalisis dengan melihat strategi komunikasi yang digunakan oleh Kartini sebagai anggota kelompok co-cultural.

Secara lebih lanjut, bentuk nyata dari realitas yang terjadi pada Film *Kartini* (2017) menunjukkan bahwa Teori Co-Cultural menawarkan berbagai konsep komunikasi yang bisa dilakukan sebagai strategi yang mungkin digunakan oleh anggota kelompok co-cultural dalam menyampaikan suaranya. Kartini, sebagai tokoh utama yang berjuang melawan norma sosial yang mengikat perempuan pada zamannya, dapat diinterpretasikan

menggunakan strategi separasi dalam menentang tekanan budaya yang mendominasi. Keberanian Kartini untuk menentukan nasibnya sebagai seorang Raden Ayu yang peduli terhadap kesetaraan menunjukkan keteguhan dan perlawanan terhadap norma budaya yang membatasi perempuan. Dalam hal ini, Teori Co-Cultural membantu mengungkapkan dinamika kompleks ketidaksetaraan sosial dan gender yang ada dalam adegan tersebut, mengedepankan peran Kartini sebagai anggota kelompok co-cultural yang aktif menentang hegemoni budaya mayoritas.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa film *Kartini* (2017) menghadirkan representasi perjuangan emansipasi wanita dalam konteks hegemoni patriarki yang tertanam dalam budaya Jawa. Kartini, sebagai agen perlawanan, menantang norma-norma budaya dan ideologi patriarki yang membatasi ruang gerak perempuan. Film ini menunjukkan bagaimana patriarki, melalui tradisi dan nilai-nilai budaya Jawa, melegitimasi subordinasi perempuan dan membatasi akses mereka terhadap pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik. Perjuangan Kartini dalam emansipasi untuk mewujudkan pembebasan fisik, pemikiran, dan hak-hak sosial bagi perempuan merupakan bentuk perlawanan terhadap hegemoni patriarki. Film ini menunjukkan kontradiksi dan negosiasi dalam proses emansipasi wanita, serta peran penting Kartini dalam mendorong perubahan sosial dan kesetaraan gender.

Pergerakan Kartini merefleksikan adanya emansipasi di tengah keterbatasan ruang gerak atas aturan budaya yang mengikat, representasi emansipasi wanita yang ditunjukkan dalam film ini juga turut menunjukkan relasi gender yang ada di antara

tokoh-tokoh pria dan wanita. Dinamika dalam interaksi yang terjadi pada adegan-adegan terpilih yang diteliti menunjukkan bahwa pada zaman di mana Kartini melakukan pergerakan, pemahaman mengenai kesetaraan gender di mana semua manusia baik pria maupun wanita memiliki hak atas kehidupan yang sama belum tertanam secara menyeluruh pada masyarakat, bahkan masih segelintir tokoh yang percaya akan perwujudan kesetaraan relasi gender. Mayoritas lainnya, masih memiliki pandangan bahwa relasi gender yang ada diposisikan oleh budaya secara turun-menurun adalah sesuatu yang wajar dan memang sudah semestinya dipatuhi tanpa menolak ataupun perlu melakukan perubahan. Narasi tentang bagaimana wanita ditempatkan pada sektor domestik dan idealnya menjadi sosok penurut sementara laki-laki hadir sebagai sosok pemimpin yang lebih dominan dan lebih aktif pada sektor sosial kemasyarakatan masih diagung-agungkan pada masa kolonial.

## REFERENSI

- Croteau, D., Hoynes, W., College, V., & University, V. C. (2019). *Media/Society Technology, Industries, Content, and Users*.
- Fiske, J. (2001). *Television Culture*. Taylor & Francis Group.
- Hall, S. (2013). *Representation: Cultural Representations dan Signifying Practices*. Sage Publications.
- Hall, S. (1997). *Cultural Studies: A Theoretical Overview*. Lawrence & Wishart.
- Handayani, C. S., & Novianto, A. (2004). *Kuasa wanita jawa*. LKIS Pelangi Aksara.
- Hodkinson, P. (2017). *Media Culture and Society: An Introduction 2nd Edition*. Sage Publications.
- Hooks, Karen L. 2015. *Auditing dan Assurance Service*. United States of America: John Wiley & Sons, Inc. ISBN: 978-0-471-72634
- Kellner, D. (2015). *Cinema and Film*. UCLA.
- Littlejohn, S. (2017). *Theories of Human Communication*. Wadsworth Publishing Company.
- McQuail, D. (2020). *McQuail's media and mass communication theory*.
- McVey, R.T. (2021). *Kemunculan Komunisme di Indonesia*. Terj. Tim Komunitas Bambu. Depok Komunitas Bambu
- Mead, G.H. (1962) *Mind Self and Society*. The University of Chicago Press, Chicago.
- Murniati, A. N. P. (2004). *Getar gender*. Indonesiatera.
- Spivak, F. C. (2018). *Rethinking comparativist literary studies. Interventions: International Journal of Postcolonial Studies*, 20(02), 227-243.
- Thornharm, S. (2009). *Gender and The Media*. Polity Press.
- Ting-Toomey, Stella & Dorjee, Tenzin. (2015), *Intercultural and intergroup communication competence: Toward an integrative perspective*.
- Trianton, T. (2013). *Film Sebagai Media Belajar*.